



IMPLIKASI KEBIJAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-AUSTRALIA

Sita Hidriyah*)

Abstrak

Presiden Jokowi menolak permohonan grasi dua terpidana mati berkewarganegaraan Australia atas kasus narkoba. Sebagai bentuk upaya melindungi warga negaranya di luar negeri, Pemerintah Australia masih berupaya mencegah esekusi mati tersebut. Indonesia menghargai usaha Australia itu namun supremasi hukum Indonesia harus tetap dihormati. Jika nantinya eksekusi mati dilaksanakan, hubungan Indonesia dan Australia tidak akan menjadi keruh mengingat hubungan baik yang sudah terjalin antara kedua negara. Indonesia dan Australia dianggap sama-sama saling membutuhkan mengingat banyaknya kepentingan dan persoalan yang harus dihadapi secara bersama. Pasang surut yang dialami menjadi hal biasa dalam hubungan kedua negara.

Pendahuluan

Dua Warga Negara (WN) Australia, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran selaku gembong narkoba yang ditangkap pada April 2005 akan menghadapi eksekusi mati. Presiden Jokowi menolak permohonan grasi yang diajukan dan telah diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada 22 Januari 2015. Putusan hukuman mati tersebut dijatuhkan oleh pengadilan independen tanpa campur tangan pemerintah. Jadwal eksekusi sendiri belum ditetapkan sebab kejaksaan masih berupaya memindahkan beberapa terpidana mati dari lembaga permasyarakatan mereka ke Nusakambangan yang menjadi lokasi eksekusi.

Upaya peninjauan kembali tengah diupayakan kuasa hukum kedua terpidana agar eksekusi tidak jadi dilakukan. Sementara

itu, perdana menteri dan warga Australia terus mengajukan banding dan pembelaan untuk membatalkan hukuman dikarenakan terpidana telah menjalani rehabilitasi dengan baik, sekaligus memohon pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menghukum mati mereka. Dalam persidangan, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran bersikeras tidak terlibat dalam penyelundupan dan bahkan mengatakan mereka dijebak. Sayangnya hasil rekaman kamera pengintai menunjukkan hal yang lain. Hasil rekaman, catatan telpon dan juga pengakuan para kurir yang diaturnya menunjukkan hal sebaliknya dan menguatkan bahwa merekalah otak dari penyelundupan narkoba. Pada tahun 2006 mereka berdua dijatuhi hukuman mati.

*) Peneliti Muda Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: sita.hidriyah@dpr.go.id



Ketegasan Presiden Jokowi Terhadap Hukuman Mati

Jokowi menegaskan akan komitmennya untuk terus memerangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Presiden menginstruksikan kepada jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk bekerja sama dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di tanah air. Kejaksaan Agung sendiri telah mengeksekusi mati 6 terpidana pada 18 Januari 2015 lalu. Ketegasan Jokowi pada hukuman mati menunjukkan bahwa dirinya tidak memberikan ruang pengampunan dalam persoalan narkoba. Jokowi beralasan, penolakan ini untuk memberikan shock therapy kepada para pelaku kejahatan narkoba. Ia mengatakan, bahwa terpidana mati narkoba yang ditolak permohonan grasinya sebagian besar adalah bandar yang atas perbuatannya dan kelompoknya dianggap merusak generasi penerus bangsa. Tidak hanya pada kasus narkoba, Jokowi juga diharapkan dapat tegas dalam persoalan hukum lainnya.

Pemerintah akan tetap konsisten dalam mengeksekusi terpidana mati kasus narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya termasuk dari kalangan Warga Negara Asing (WNA). Pemerintah yakin tidak satu pun ketentuan hukum yang dilanggar terkait kebijakan itu sehingga konsistensi pada pelaksanaan hukuman tetap dilakukan dalam setiap komunikasi baik via telpon maupun surat. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia harus tegas dalam penegakan hukum terkait narkoba. Setiap tahunnya, BNN mencatat warga yang tewas akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 12 ribu jiwa lebih atau berkisar 37 orang per hari. Kematian akibat penyalahgunaan narkoba tersebut bukan hanya disebabkan over dosis, melainkan faktor lain seperti penularan HIV/AIDS dan hepatitis yang ditularkan melalui penggunaan jarum suntik. BNN Provinsi DKI Jakarta memperkirakan, terdapat sekitar 500 ribu warga Ibu Kota yang masih menjadi pecandu narkoba. Jumlah ini adalah hasil perbandingan survei yang dilakukan oleh BNN dengan Pusat Pendidikan Kesehatan (Pusdikkes) Universitas Indonesia di tahun 2013 dan 2014. Dari penelitian akhir 2014, 5,5 persen, atau sekitar 500 ribuan jiwa masih ketergantungan narkoba.

Presiden Jokowi mulai menunjukkan komitmen dan keseriusannya untuk mengatasi

kondisi darurat narkoba itu. Salah satu bentuk komitmen dan keseriusan tersebut adalah dengan menolak grasi bagi pengedar yang dijatuhi hukuman mati. Saat ini sudah ada 64 kasus yang sudah diputuskan untuk hukuman mati dan mengajukan grasi, namun Jokowi memastikan semua grasi akan ditolak. Jokowi menyatakan akan tetap konsisten meskipun mengaku mendapatkan tekanan dari berbagai pihak termasuk PBB, NGO, hingga mendapatkan surat amnesti internasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon juga telah mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan hukuman mati. Menghadapi berbagai tekanan internasional, Jokowi menyatakan, Indonesia harus tegas dalam penegakan hukum terkait narkoba karena jika dibiarkan dan ada pengampunan, Indonesia dapat menjadi negara yang hancur padahal Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Presiden juga menyayangkan eksekusi mati yang dijatuhkan kepada terpidana kasus narkoba sering kali tidak segera dilaksanakan sehingga efek jera tidak segera dirasakan. Yang terjadi justru yang di dalam tahanan tetap dapat mengatur peredaran narkoba. Hal tersebut tidak bisa terus-menerus dibiarkan karena menyangkut moralitas dan mentalitas dimana selain belasan ribu orang meninggal karena narkoba tapi juga jutaan lainnya yang harus direhabilitasi selain ada 1,2 juta orang yang sudah tidak bisa direhabilitasi. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa eksekusi mati terhadap bandar narkoba adalah perang terhadap kejahatan narkoba sehingga pemerintah akan konsisten menerapkan kebijakan tersebut.

Hubungan Indonesia - Australia Pascapenolakan Grasi

Berbagai aksi dan reaksi muncul atas ditolaknya grasi terpidana mati kasus narkoba WN Australia. Masyarakat Australia merasa kecewa atas apa yang akan dilakukan pemerintah Indonesia kepada WN Australia. Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mengatakan masyarakat Australia akan mencari cara untuk memperlihatkan rasa tidak senangnya kepada Indonesia dan menjadi wajar apabila sebuah negara mencoba menyelamatkan warganya yang akan dihukum mati di negara lain. Pada 18 Februari 2015, para praktisi hukum, mulai dari hakim, jaksa, hingga pengacara, turun ke jalan melakukan

aksi damai mendukung pembatalan eksekusi terpidana mati Bali Nine. Aksi di pusat kota Melbourne ini antara lain dihadiri Hakim Agung Negara Bagian Victoria, Lex Lasry yang mengatakan, mengeksekusi kedua orang ini setelah 9 tahun rehabilitasi akan menjadi tragedi.

Bentuk kekecewaan Australia pada Indonesia dilakukan oleh berbagai kalangan Australia. Bukan hanya masyarakat sipil, namun enam mantan perdana menteri Australia mengajukan banding dan pembelaan untuk dua terpidana mati Bali Nine. Mereka mendukung Australia untuk melobi Indonesia menghentikan rencana eksekusi. Ditambah lagi Menlu Australia Julie Bishop yang mengatakan, pihaknya menerima banyak surat dari warganya yang berisi protes terhadap eksekusi mati Myuran Sukuraman dan Andrew Chan. Dia juga mengatakan pihaknya bisa memboikot pariwisata Indonesia jika memang eksekusi tersebut tetap dilakukan.

PM Abbott baru-baru ini mengajukan permohonan kepada Jokowi agar lebih responsif dengan desakan yang dilakukan pihaknya. Dia mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk memahami posisi bila warga negaranya terancam dieksekusi mati di negara lain. Yang terakhir bahkan disebut-sebut Abbott menginginkan politik balas budi mengaitkan bantuan kemanusiaan pada tsunami 2004 untuk pembatalan eksekusi yang secara jelas bertolak belakang dengan penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan yang disampaikannya tersebut tidak mencerminkan Australia. Untuk mencegah timbulnya ketersinggungan, pernyataan yang dimaksud kemungkinan adalah untuk menunjukkan akan betapa eratnya hubungan kedua negara selama ini.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) telah menerima ribuan surat elektronik yang memprotes dan mengecam KBRI. Isu gangguan keamanan dihembuskan media Australia demi pembatalan hukuman mati bagi dua warganya, namun kehidupan tetap berjalan normal di Australia. Meskipun berkembang kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia, Kepolisian Australia tetap menjamin adanya keamanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Australia. Misalnya Kepolisian negara bagian Queensland, Petugas Khusus Kepolisian Queensland menyebutkan agar WNI segera melapor ke polisi setempat apabila ada

gangguan keamanan yang menimpa mereka. KBRI Canberra bahkan telah berkoordinasi dengan kepolisian Australia apabila ada gangguan menimpa WNI dan menghimbau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Sementara itu, permasalahan eksekusi dua WN Australia tidak akan mengancam neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya ketergantungan Australia terhadap pasar Indonesia sebanding dengan ketergantungan Indonesia terhadap produk sapi seperti daging Australia.

Pemanfaatan Isu Hukuman Mati

Hubungan Indonesia Australia tidak akan berdampak buruk dengan terlaksananya hukuman mati, mengingat hubungan kedua negara selalu mengalami pasang surut. Pasang surut inilah yang terjadi pula saat Abbott menjabat sebagai Perdana Menteri. Meskipun wilayah negara saling berdekatan, budaya dan ideologi adalah berbeda. Tidak semua warga Australia mendukung dan sepakat akan sikap yang ditunjukkan Abbott dan manuver-manuver yang diberikannya dalam banyak permasalahan. Ia hanya memanfaatkan isu eksekusi mati dikarenakan popularitasnya yang semakin menurun di mata warga negaranya. Sama halnya dengan yang dilakukan Presiden Brasil dalam melakukan pembelaan berlebihan pada warga negaranya yang kemudian menunda penerimaan surat kepercayaan Dubes Indonesia untuk Brasil. Pemerintah Indonesia harus berpikir secara jernih dan tidak perlu mengikuti sikap Brasil. Hal ini pula yang tentunya tidak diharapkan akan hubungan Indonesia dan Australia.

Penolakan hukuman mati juga muncul dari dalam negeri Indonesia sendiri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) beserta organisasi HAM di Indonesia turut menyatakan sikap terkait eksekusi mati terhadap enam orang terpidana narkoba. Menurut mereka, Indonesia harus siap apabila negara lain memberlakukan hukuman yang sama terhadap WNI yang terlibat kejahatan narkoba di luar negeri. Hal ini menimbulkan adanya pertentangan antara kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia dimana Indonesia selalu berupaya untuk menyelamatkan warga negaranya dari hukuman mati, sementara di dalam negeri, hukuman mati diberlakukan terhadap para terpidana narkoba.

Presiden Jokowi diharapkan untuk

dapat konsisten mengenai hukuman mati. Indonesia juga punya kedaulatan hukum yang harus ditegakkan. Setelah pada bulan Januari lalu mengeksekusi WN Brasil, Pemerintah Brasil telah menolak keberadaan Dubes Indonesia sehingga pemerintah menarik dubesnya dari Brasil. Ketegasan Jokowi kembali dilakukan atas penarikan ini. Kendati demikian, pemerintah menjelaskan jika putusan tersebut merupakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penundaan eksekusi masih terjadi tetapi penerapan hukuman juga diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Penundaan ini sama misalnya dengan kasus WNI yang akan mendapatkan eksekusi di Arab Saudi dimana Indonesia juga berusaha dengan berbagai cara mencegahnya entah dengan mengirimkan utusan atau membayar jaminan. Tetapi hal yang sering terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tentulah berbeda terlebih kepada alasan hukuman.

Penutup

Pemerintah Australia hendaknya menghormati penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memahami posisi pemerintah Australia yang berupaya melindungi warga negaranya, namun Australia juga harus memahami bahwa ini merupakan isu penegakan hukum semata, bukan isu diplomatik. Penegakan hukum melawan kejahatan luar biasa, penegakan hukum yang dijalankan oleh negara berdaulat. Pemerintah tidak perlu khawatir menerapkan hukuman itu selama masyarakat masih mendukungnya. Permasalahan jika nantinya ada gesekan diplomatik dengan negara sahabat, menjadi tugas pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri. Bagaimana pemerintah lewat kemahirannya memberi pengertian kepada negara sahabat bahwa hukuman mati tidak dilarang di Indonesia.

Penolakan grasi terpidana mati hanya menjadi gejala kecil dalam pasang surut hubungan Indonesia dan Australia. Sikap pemerintah Australia dalam menilai Indonesia tidak akan mempengaruhi kerja sama Indonesia Australia. Sikap yang ditunjukkan bukanlah mewakili sikap Australia secara keseluruhan sehingga komitmen untuk eksekusi mati tetap harus dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mendorong pemerintah untuk menjaga hubungan baik mengingat kedua negara sudah lama menjadi teman baik. Selain itu,

DPR harus mendukung serta meyakinkan pemerintah bahwa tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan konstitusi. Solusi yang dapat memberikan efek positif bagi kedua negara sangat diharapkan sehingga tidak ada diskriminasi di masyarakat. DPR meminta pemerintah untuk bersikap diplomatis pada kasus eksekusi WN Australia mengingat dengan dasar bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis soal narkoba dan percaya bahwa hukuman mati mesti diterapkan. Di lain sisi, Indonesia juga harus siap dalam menerima resiko. Jika ada warga Indonesia di luar negeri yang terlibat dalam kejahatan narkoba dan dihukum mati, Indonesia harus dapat menerima keputusan tersebut.

Referensi

- “Kisah Lain dari Pemimpin Bali Nine”, Kompas 16 Februari 2015.
- “Polisi Australia Jamin Keamanan WNI”, Media Indonesia 16 Februari 2015.
- “Eksekusi Mati: RI Tak Gentar Hadapi Tekanan Pihak Luar”, Kompas 17 Februari 2015.
- “Pernyataan Abbott Dinilai Intervensi Hukum RI”, Media Indonesia 20 Februari 2015.
- “Wapres Jusuf Kalla Sangkal Ada Ancaman”, Kompas 20 Februari 2015.
- “Jokowi Tolak Grasi Terpidana Anggota Bali Nine, Andrew Chan”, <http://www.tempo.co/read/news/2015/01/22/058636815/Jokowi-Tolak-Grasi-Terpidana-Bali-Nine-Andrew-Chan>, diakses 28 Januari 2015.
- “Presiden Jokowi Pastikan Tolak Semua Grasi Kasus Narkoba”, <http://www.antaraneews.com/berita/480011/presiden-jokowi-pastikan-tolak-semua-grasi-kasus-narkoba>, diakses 16 Februari 2015.
- “Polisi Australia Makin Disalahkan Atas Penangkapan Geng Bali Nine di Indonesia”, <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2015-02-17/polisi-australia-makin-disalahkan-atas-penangkapan-geng-bali-nine-di-indonesia/1416219>, diakses 19 Februari 2015.
- “Eksekusi Tak Selesaikan Masalah Narkoba”, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150119_menlu_aussie_hkmm_mati, diakses 20 Februari 2015.
- Rakyat Australia Malu Dengan Abbott, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/24/nk8jim-rakyat-australia-malu-dengan-abbott>, diakses tanggal 24 Februari 2015.